

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia terkait dengan produk dan barang kian meningkat. Hal ini juga terus didukung dengan perkembangan industri yang terus memwadahi permintaan dari kebutuhan dan keinginan manusia. Selaras dengan hal tersebut, limbah dari produksi yang dikonsumsi terus menumpuk dan menyebabkan peningkatan jumlah limbah di seluruh dunia. Limbah sebagai bagian dari konsekuensi perkembangan kegiatan industri, berpotensi menimbulkan dampak baru yang menyebabkan kerugian skala masif di masa mendatang.

Berdasarkan data dari PBB, sebanyak 2.12 miliar limbah terkumpul tiap tahunnya (UNEP, 2009). Salah satu jenis limbah ini adalah limbah plastik yang menjadi mayoritas komoditi skala global yang telah menyusupi hampir dalam setiap aspek kehidupan manusia. Pertumbuhan produksi limbah ini telah meningkat secara signifikan dari seluruh industri manufaktur yang pada awalnya hanya 2 juta metric ton pada tahun 1950 meningkat menjadi 8,3 miliar metric ton plastik pada tahun 2017 (Geyer et al., 2017). Dari jumlah limbah plastik tersebut, hanya 9% plastik yang dapat didaur ulang secara global dan sisanya berakhir pada pembuangan akhir yang mengontaminasi lingkungan. Sekitar 4 sampai 12 juta metric ton limbah plastik telah memasuki lautan tiap tahunnya (Jambeck et al., 2015).

Faktanya, untuk dapat menghindari ancaman dari permasalahan limbah dan menekan biaya pengelolaannya, beberapa negara industri lebih memilih untuk

memperdagangkan limbah hasil industri mereka (Maulidya et al., 2020). Beberapa jenis limbah hasil produksi dan rumah tangga seperti limbah elektronik, kertas, plastik masih memiliki nilai ekonomis apabila didaur ulang. Hal inilah yang kemudian membuat limbah menjadi bagian dari perdagangan internasional. Banyak negara rela mendatangkan limbah dari negara-negara industri untuk mereka kelola dan daur ulang. Meski begitu, limbah impor ini tidak hanya membawa manfaat ekonomis saja, namun juga mendatangkan berbagai permasalahan seperti permasalahan lingkungan, hingga kesehatan masyarakat.

Fenomena perdagangan limbah memang sudah diatur dalam konvensi Basel. Konvensi ini berisi mengenai aturan dan protocol agar limbah ekspor ini masih layak untuk didaur ulang dan tidak mengandung zat berbahaya, baik bagi lingkungan maupun kesehatan. Sehingga perdagangan limbah seharusnya tidak lagi membahayakan negara-negara berkembang. Namun yang menjadi masalah berikutnya disini adalah kurangnya definisi yang jelas dari perbedaan “limbah” dengan “produk” yang kemudian menjadikan peluang untuk memperdagangkan limbah berbahaya atas nama “produk” (Willén & Johansson, 2008). Dalam keberjalannya, perdagangan limbah berbahaya ternyata juga masih dilakukan secara illegal. Di Indonesia sendiri, tercatat pada tahun 2019 sebanyak 318 kontainer dari total 882 kontainer yang berisikan limbah impor ternyata mengandung limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) (CNN Indonesia, 2019).

Uni Eropa, merupakan satu-satunya institusi regional yang menjadi anggota dalam Basel Convention dan Kyoto Protocol yang tergabung dalam kategori Annex I.

Ini berarti Uni Eropa diakui sebagai kelompok negara industri yang pernah menjadi bagian dari OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Meskipun berpartisipasi dalam kebijakan lingkungan, Uni Eropa telah melaksanakan suatu kebijakan yang kontroversial, yaitu ekspor limbah ke negara-negara Asia. Pada tahun 2021, Uni Eropa telah mengekspor 33 juta ton limbahnya ke negara lain. Dalam hal ini, Uni Eropa mengirimkan limbah dengan tujuan untuk didaur ulang di negara-negara penerima. Mekanisme ini sering dikenal sebagai perdagangan limbah global (Khairunnisa, 2021).

Penelitian oleh Plastik Soup Foundation telah menunjukkan bahwa Belanda memainkan peran utama dalam perdagangan limbah tersebut. Belanda merupakan pengeksportir limbah plastik terbesar Uni Eropa ke negara-negara non-OECD. Pada tahun 2021, Belanda merupakan negara anggota Uni Eropa yang mengekspor limbah terbanyak, dengan total 6,4 juta ton limbah ke negara-negara non-Uni Eropa, diikuti oleh Belgia 4,3 juta ton dan Jerman 3,5 juta ton. Pada periode yang sama, ekspor plastik Belanda ke Amerika Latin, Asia dan Afrika meningkat lebih dari dua kali lipat, sehingga menyebabkan para pengkampanye lingkungan hidup mengancam limbah yang dibuang ke luar negeri oleh perantara Belanda. Adapun tujuan utama ekspor limbah dari Uni Eropa pada tahun 2021 adalah Turki dengan volume mencapai sekitar 14,7 juta ton. Angka ini hampir setengah atau sekitar 44,54% dari total limbah yang diekspor. Posisi kedua dalam tujuan ekspor limbah dari UE adalah India, yang menerima hampir 2,4 juta ton limbah pada tahun yang sama. Mesir menduduki peringkat ketiga dengan menerima sekitar 1,9 juta ton limbah ekspor dari UE.

Kemudian, Swiss menerima sekitar 1,7 juta ton limbah dari UE, disusul oleh Inggris dengan sekitar 1,5 juta ton, Norwegia dengan sekitar 1,4 juta ton, dan Pakistan dengan sekitar 1,3 juta ton. Indonesia juga termasuk dalam daftar negara tujuan utama ekspor limbah dari UE pada tahun 2021, menempati peringkat kedelapan dengan total sekitar 1,1 juta ton limbah. Sementara itu, Amerika Serikat dan Maroko masing-masing menerima sekitar 0,9 juta ton dan 0,6 juta ton limbah ekspor (Yanatma, 2023).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mengimpor limbah terbanyak didunia. Mengutip data UN Comtrade, negara asal impor limbah plastik terbesar Indonesia adalah Belanda. Indonesia mengimpor 51,5 ribu ton limbah plastik dari negara tersebut. Selanjutnya, Indonesia mengimpor 37,54 ribu ton limbah plastik dari Jerman dan 17,1 ribu ton limbah plastik dari Slovenia. Impor limbah plastik dari Amerika Serikat tercatat sebesar 16,4 ribu ton. Hal ini menjadikan Indonesia menempati peringkat ke 7 sebagai negara pengimpor limbah terbanyak didunia (Priyambodo, 2023). Pada tahun 2018, China sebagai importir limbah terbesar di dunia menerapkan kebijakan *national sword policy* yang menutup keran impor limbahnya. Hal ini berdampak besar pada arus perdagangan limbah dunia yang sebelumnya China menjadi tujuan eksportir limbah kini beralih ke negara negara di Asia Tenggara. Setelah penerapan kebijakan larangan impor limbah di China, jumlah impor limbah Indonesia meningkat hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya yakni sebesar 320.000 ton (Ecoton et al., 2019).

Data dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2019 menyatakan jika di Indonesia terdapat 50 industri daur ulang yang berbahan baku

limbah plastik. Industri ini menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja dan telah berinvestasi sebesar Rp2,6 triliun (Kemenperin, 2019). Memang tidak dapat dipungkiri apabila sector daur ulang limbah ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, bahkan juga dinilai dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Namun bersamaan dengan hal tersebut, industry daur ulang limbah yang bersumber dari impor limbah ini juga memiliki dampak negatif. Pasalnya pengelolaan industry daur ulang limbah di Indonesia ini belum 100 persen sempurna sesuai dengan standard dalam konvensi basel. Dari total limbah plastik yang di impor, hanya 60 % yang dapat didaur ulang, sisanya sebanyak 40% tidak dapat didaur ulang dan ikut menumpuk bersama limbah domestic. Hal ini berakibat pada tingginya resiko pencemaran terhadap lingkungan yang mengancam lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Peningkatan jumlah impor limbah plastik akibat kebijakan National Sword Policy China juga berdampak pada meningkatnya angka penyelundupan limbah impor B3 secara illegal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa limbah B3 ini sangat berbahaya bagi lingkungan dan biologis. Di Indonesia sendiri telah banyak permasalahan lingkungan dan kesehatan akibat dari limbah B3. Dalam studi yang dilakukan di Sleman pada tahun 2016 menunjukkan bahaya dari kontak langsung maupun tidak langsung dari limbah B3. Seperti halnya limbah B3 dari baterai dapat membahayakan otak dan menyebabkan kanker, limbah elektronik dapat menyebabkan penyakit kulit, pembengkakan otak dan membahayakan janin, limbah medis dapat menyebabkan

keracunan, limbah bahan bakar dapat menyebabkan ledakan dan kebakaran (Iswanto et al., 2016).

Di Jawa Timur, Industri daur ulang kertas yang berbahan baku kertas dan plastik digunakan untuk membuat kertas, majalah, buku dan lain sebagainya. Namun, industry ini telah meracuni rantai makanan di daerah tersebut. Skrap plastik dan kertas yang tidak dapat didaur ulang digunakan untuk bahan bakar pembuatan tahu. Telur ayam buras yang diambil dari desa di Jawa Timur diketahui mengandung tingkat dioksin yang hampir setara dengan telur yang ada di Vietnam ketika daerah tersebut terkontaminasi penggunaan Agent Orange oleh tentara AS. Racun yang terkandung dalam telur ayam buras tersebut berasal dari ayam buras yang memakui makanan dan tanah yang telah tercemar limbah impor di Desa Bangun dan Tropodo, Jawa Timur. Dampak dari kandungan dioksin terkhlorinasi terhadap kesehatan manusia termasuk diantaranya penyakit kardiovaskular, diabetes, kanker, porfiria, endometriosis, menopause dini, perubahan hormon testosteron dan tiroid, dan perubahan respons sistem kekebalan tubuh. Selain mengandung dioksin, telur tersebut juga mengandung zat kimia berbahaya yang digunakan dalam plasti seperti SCCPs dan PBDEs. Zat kimia dapat menyebabkan kanker pada manusia (Ecoton et al., 2019).

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai permasalahan impor limbah di Indonesia sudah banyak di temui. Diantaranya adalah jurnal yang ditulis oleh Yusril Ihza Ali (2020) dengan judul "Lingkungan dan Globalisasi: Solusi akan Relasi yang Problematic Studi Kasus Peningkatan Limbah Impor Indonesia Pasca *National Sword Policy* China Tahun 2018". Penelitian ini menjelaskan bahwa Kebijakan *National*

Sword Policy China pada tahun 2018 membuat negara eksportir limbah beralih ke negara importir lain, salah satunya adalah Indonesia. Hal ini membuat impor limbah di Indonesia meningkat 200% yang kemudian menyebabkan beragam permasalahan lingkungan karena manajemen limbah di Indonesia yang buruk. Penelitian ini kemudian menjelaskan bahwa permasalahan lingkungan ini tidak terlepas dari peran perdagangan internasional. Perlu adanya regulasi yang mengatur mengenai perdagangan internasional agar kegiatan tersebut tidak hanya mengutamakan kepentingan manusia, namun juga dampaknya pada alam.

Penelitian kedua adalah Jurnal yang ditulis oleh Novaradila et al. (2020) yang berjudul “Ancaman Sampah Impor bagi Keamanan Manusia: Studi Kasus Desa Bangun dan Tropodo 2018-2019”. Dalam penelitiannya, Sampah Impor ini ternyata menyebabkan berbagai krisis lingkungan. Krisis lingkungan ini faktanya juga mengancam kesehatan manusia. Selain itu penelitian ini juga melihat dari sisi sekuritisasi, dimana adanya peran dari LSM yang mendorong dan meyakinkan para “elite” jika persoalan lingkungan merupakan isu yang mengancam keamanan masyarakat Indonesia karena lingkungan hidup yang rusak dapat mengakibatkan degradasi kesehatan juga. Hal ini kemudian direspon dengan adanya perubahan peraturan pada Permendag No. 31 Tahun 2016 menjadi Permendag No. 84 Tahun 2019.

Penelitian ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Gracety et al (2022) yang berjudul “Ekspor Limbah Elektronik dari Beberapa Negara Eropa ke Ghana dalam Perspektif Imperialisme Ekologi”. Dalam penelitiannya, Grace memaparkan bahwa ekspor limbah elektronik dari negara Eropa ke Ghana merupakan bentuk ketidakadilan

lingkungan yang berujung pada kolonisasi lingkungan oleh Eropa ke Ghana. Hal ini disebabkan perbedaan kualitas lingkungan, ketimpangan ekonomi, perbedaan dalam kondisi sosial dan budaya, dan implementasi peraturan dan kebijakan yang tidak memadai.

Perdagangan limbah menjadi permasalahan dilematis. Karena di satu sisi dapat berdampak ekonomis bagi kedua negara yang saling terlibat, namun juga membawa permasalahan yang cukup serius. Penelitian diatas menyoroiti dampak perdagangan limbah yang cenderung merusak bagi negara pengimpor. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, mengapa Indonesia terus melakukan impor limbah meski membawa dampak yang merusak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Penulis berusaha menjawab melalui teori Ketergantungan dalam paradigma Marxisme. Teori marxisme menjadi relevan sebagai alat analisis dalam mengkaji penelitian ini karena dapat digunakan untuk memahami dinamika ekonomi global dan dampaknya terhadap negara-negara berkembang. Hal ini sekaligus menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya, penulis lebih berfokus dalam menganalisa permasalahan structural dalam dinamika hubungan global antara negara yang lebih maju secara ekonomi (negara inti) dan negara-negara berkembang (negara pinggiran) dalam fenomena perdagangan limbah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dari hubungan ketimpangan dan ketergantungan dalam fenomena perdagangan limbah.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berasal dari pertanyaan kunci: “Bagaimana impor limbah yang dilakukan oleh Indonesia dari Belanda mencerminkan ketimpangan dan ketergantungan?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Umum

Peneliti ingin meneliti fenomena impor limbah yang terus dilakukan oleh Indonesia dari Belanda.

1.3.2 Khusus

Dari pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena impor limbah yang terus dilakukan oleh Indonesia dari Belanda melalui perspektif marxisme.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsep pemikiran yang baru dalam perkembangan akademik ilmu hubungan internasional khususnya dalam memahami ketimpangan struktural dalam tatanan global. Penelitian ini juga ingin memberikan sumbangan pemikiran dari analisis teori ketergantungan dalam kaitannya dengan fenomena impor limbah yang terus dilakukan oleh Indonesia.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemecahan masalah dalam kasus permasalahan lingkungan khususnya dalam melihat fenomena limbah yang diperdagangkan kepada negara berkembang. Dikarenakan Indonesia termasuk salah satu negara berkembang, kemungkinan untuk merasakan permasalahan dari fenomena perdagangan limbah juga akan mungkin terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini juga dapat membantu untuk memberikan pengembangan riset di Indonesia melalui universitas. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan dengan lebih baik pula.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Teori Marxisme

Teori Marxis dalam hubungan internasional melihat hubungan antara negara-negara sebagai hasil dari pertentangan kelas sosial dalam masyarakat kapitalis. Teori Marxis menyoroti eksploitasi ekonomi, ketimpangan kekuasaan, dan ketidakadilan dalam sistem kapitalis global, dan memandang negara sebagai alat yang digunakan oleh kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaan dan mengamankan keuntungan mereka.

Menurut teori ini, negara-negara dipengaruhi oleh pertarungan antara pemilik modal (kapitalis) dan pekerja (buruh) dalam mencapai kepentingan ekonomi dan politik mereka. Karl Marx dalam Magnis-Suseno(2018) menjelaskan dua kelas yang berlawanan ini saling membutuhkan namun memiliki Ketergantungan yang tidak

seimbang. Ciri khas masyarakat kapitalis adalah keterbagian dalam kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas adalah kelas para pemilik alat produksi, kelas bawah adalah kaum buruh. Kelas atas adalah kelas sosial yang menguasai bidang Produksi, kelas bawah adalah mereka yang harus tunduk terhadap kekuasaan kelas atas. .Kelas atas adalah borjuasi atau kelas kapitalis, memiliki alat-alat produksi, kelas bawah adalah proletariat, atau kelas pekerja, hanya memiliki tenaga kerjanya untuk dijual kepada borjuis. Borjuasi mengambil sebagian dari nilai tenaga kerja proletariat sebagai laba. Keuntungan ini adalah hasil dari pengisapan atau eksploitasi tenaga kerja. Kelas atas adalah seorang pengisap tenaga kerja orang lain dan kelas bawah merupakan kelas terisap. Hubungan antara kelas atas dan kelas bawah merupakan hubungan kekuasaan: yang satu berkuasa atas yang lain, dimana kelas atas secara hakiki merupakan penindas (Magnis-Suseno, 2018). Marxis juga setuju dengan merkantilis bahwa politik dan ekonomi terkait erat. Keduanya menolak pandangan kaum liberal tentang bidang ekonomi yang berjalan dengan hukumnya sendiri. Namun, sementara merkantilis melihat ekonomi sebagai alat politik, Marxis mengutamakan ekonomi dan politik di urutan kedua (Jackson & Sorensen, 2013). Oleh karena itu Marxisme memandang actor internasional adalah kelas sosial yang terbagi menjadi 2. Kelas borjuis dan kelas proletar atau kelas dominan dan kelas yang didominasi (Rosyidin, 2020).

Sebagai studi Ekonomi Politik Internasional, marxis memandang bahwa negara tidaklah otonom karena mereka digerakkan oleh kepentingan kelas yang berkuasa dan negara kapitalis terutama oleh kepentingan kaum borjuis. Sehingga perjuangan antarnegara dapat dilihat dalam konteks persaingan ekonomi di antara kelas kapitalis

dari negara yang berbeda. Bagi marxis, kapitalisme dalam sistem ekonomi bersifat ekspansif, selalu mencari pasar baru dan lebih menguntungkan. Oleh karena itu, konflik tidak terbatas pada negara-negara, justru meluas keseluruh dunia dalam gelombang kapitalisme. Hal ini lah yang mendasari terjadinya imperialisme dan kolonialisme yang sejatinya masih terus berlanjut hingga saat ini dalam bentuk globalisasi ekonomi yang dipimpin oleh perusahaan transnasional raksasa (Jackson & Sorensen, 2013). Dalam konsepsi Marxisme tersebut, kepentingan nasional sebenarnya merujuk pada kepentingan kaum kapitalis. Bagi Marxisme, kepentingan nasional tidak didefinisikan sebagai tujuan negara, melainkan sebagai kepentingan yang berfokus pada akumulasi keuntungan oleh kaum kapitalis. Dalam perspektif ini, ekonomi menentukan politik, bukan sebaliknya. Kebijakan luar negeri negara didorong oleh upaya memperoleh keuntungan bagi sejumlah pemodal besar, dan kaum kapitalis menggunakan kekuasaan dan sumber daya mereka untuk memengaruhi kebijakan negara. Oleh karena itu kebijakan luar negeri tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi justru menguntungkan kaum kapitalis. Sehingga negara merupakan alat dalam tangan-tangan kelas-kelas atas untuk mengamankan kekuasaan mereka.

Marxisme menganggap politik dunia sebagai realitas yang eksploitatif, di mana negara-negara kaya mendominasi dan menguasai negara-negara miskin. Hubungan internasional dalam pandangan Marxisme bersifat hierarkis, dengan negara-negara kaya mendominasi politik global sementara negara-negara miskin menjadi objek persaingan negara-negara kaya. Lembaga internasional dan perusahaan multinasional berperan penting dalam eksploitasi negara-negara miskin, dengan pemerintahan di

negara maju hanya peduli pada kepentingan kapitalis global. Norma-norma internasional diciptakan untuk memastikan akses keuntungan bagi negara-negara kaya tersebut. Dalam konteks ini, hubungan internasional menciptakan ketidakadilan bagi banyak negara.

1.5.2 Teori Ketergantungan

Teori Ketergantungan merupakan teori dalam ekonomi politik internasional. Teori ketergantungan mengacu pada sudut pandang yang menggambarkan hubungan ekonomi antara negara-negara kapitalis maju (disebut negara inti atau pusat) dan negara-negara berkembang (disebut negara pinggiran atau periferi). Teori ini didasarkan pada paradigma Marxis, yang berpendapat bahwa sistem kapitalis secara inheren bersifat eksploitatif dan bahwa kekayaan negara maju dibangun di atas eksploitasi negara berkembang. Theonos Dos Santos mendefinisikan Teori Ketergantungan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara negara lain, di mana negara negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Hubungan saling tergantung antara dua sistem ekonomi atau lebih, dan Hubungan antara sistem sistem ekonomi ini dengan perdagangan dunia, menjadi Hubungan ketergantungan bila ekonomi beberapa negara (yang dominan) bisa berekspansi dan bisa berdiri sendiri, sedangkan ekonomi negara negara

lainnya (yang tergantung) mengalami perubahan hanya sebagai akibat dari ekspansi tersebut, baik positif, maupun negatif” (Santos, 1970).

Arif Budiman (2000) dalam bukunya yang berjudul “Teori Pembangunan Dunia Ketiga” menjelaskan jika Marxisme membantah paham liberal yang mengatakan bahwa hubungan saling Ketergantungan antar negara didasarkan oleh posisi saling membutuhkan sehingga tidak bisa dikatakan yang satu mendominasi yang lainnya. Menurutnya paham tersebut mengabaikan derajat ketergantungan negara pusat dan pinggiran berbeda. Arif mencontohkan hubungan saling Ketergantungan ini layaknya hubungan antara majikan dan buruh. Memang keduanya saling membutuhkan namun keduanya memiliki derajat Ketergantungan yang berbeda. Buruh tidak dapat hidup jika ia tidak bekerja dan ia hanya dapat bekerja jika diberi pekerjaan oleh majikan. Sebaliknya, majikan masih akan dapat bertahan lama ketika tidak mempunyai pendapatan ketika pabriknya tidak berjalan. Ia dapat menjual pabriknya.

Seperti yang dikatakan oleh Dos Santos, negara-negara pusat bisa mandiri dalam perkembangan ekonomi mereka. Jika ekonomi negara-negara pusat sedang maju, negara-negara pinggiran juga dapat mengikuti kemajuan tersebut. Namun, jika negara-negara pusat mengalami kesulitan, negara-negara pinggiran kemungkinan akan menghadapi kesulitan juga. Ekonomi negara pinggiran sangat tergantung pada ekonomi negara-negara pusat. Namun, tidak berlaku sebaliknya. Jika negara-negara pinggiran mengalami kesulitan, tidak berarti negara-negara pusat akan terkena dampaknya, karena ekonomi negara-negara pusat tidak bergantung pada negara-negara

pinggiran. Ini adalah hubungan “saling Ketergantungan” yang tidak seimbang yang terjadi di antara mereka (Budiman, 2000).

André Gunder Frank(1984), salah satu pendukung utama teori ketergantungan, berpendapat bahwa perkembangan sistem kapitalis dalam skala internasional telah menyebabkan pembagian dunia menjadi dua kelompok: negara-negara metropolis maju dan negara-negara satelit terbelakang. Frank mendefinisikan ketergantungan sebagai kondisi yang dialami oleh satelit ketika berhubungan dengan metropole (So & Suwarsono, 1991). Frank berpendapat bahwa sistem kapitalis global dicirikan oleh pembagian kerja yang tidak merata, di mana negara-negara inti mendominasi dan mengeksploitasi negara-negara pinggiran untuk sumber daya dan tenaga kerja murah mereka (Langa, 2023). Eksploitasi ini melanggengkan keterbelakangan negara-negara pinggiran, karena mereka tidak dapat mengembangkan industri dan ekonomi mereka sendiri karena ketergantungan mereka pada negara-negara inti (Emeh & Jeffrey, 2012). Negara-negara inti, di sisi lain, mendapat manfaat dari pengaturan ini dengan mengekstraksi sumber daya dan mempertahankan kendali atas ekonomi global (Plys, 2021).

Frank menolak gagasan bahwa pembangunan ekonomi di negara miskin akan terjadi sebagai akibat dari hubungan mereka dengan negara maju. Dia berargumen bahwa hubungan ini hanya akan mengarah pada eksploitasi lebih lanjut dan keterbelakangan. Sebaliknya, negara-negara miskin perlu melepaskan diri dari ketergantungan mereka pada negara-negara maju dan mengembangkan ekonomi mereka sendiri. Hubungan antara negara maju dan negara berkembang bersifat

asimetris dan timpang. Ketidakseimbangan kekuatan ini telah menyebabkan eksploitasi negara-negara berkembang, yang telah menciptakan kondisi keterbelakangan.

Teori ketergantungan juga menekankan peran kolonialisme dan imperialisme historis dalam membentuk sistem ekonomi global. Frank berpendapat bahwa kolonialisme meletakkan dasar bagi keterbelakangan negara-negara pinggiran dengan mengekstraksi sumber daya mereka dan mengganggu struktur sosial dan ekonomi mereka (Perera, 2016). Warisan kolonialisme ini terus melanggengkan hubungan ketergantungan antara negara-negara inti dan pinggiran.

1.6 Argumen Penelitian

Penulis berargumen bahwa fenomena impor limbah yang terus dilakukan oleh Indonesia, meskipun membawa dampak merusak, merupakan ketidakberdayaan negara berkembang yang mengalami ketergantungan pada negara maju. Ketidakberdayaan dalam perdagangan limbah menghasilkan hubungan asimetris antara negara maju dan negara berkembang yang berujung pada bentuk ketimpangan. Ketidakberdayaan negara berkembang merupakan masalah struktural dalam sistem global yang membuat Indonesia bergantung pada negara maju dalam mengimpor limbah mereka, dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian.

1.7 Definisi Konsep

1.7.1 Kelas Sosial

Dalam hubungan internasional, teori Marxis berpendapat bahwa hubungan kelas membentuk hubungan antar negara. Lenin menjelaskan definisi kelas sosial sebagai golongan sosial dalam tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam proses Produksi (Magnis-Suseno, 2018). Kelas borjuis, pusat/core, metropolite merupakan istilah kelas atas yang mengacu pada negara maju yang kuat secara finansial dan modal. Negara maju yang sudah memiliki basis teknologi tinggi dan padat modal. Oleh karena itu negara negara ini cenderung dominan. Sedangkan proletar, pinggiran/periphery, satelit merupakan istilah kelas bawah yang mengacu pada negara berkembang atau negara dunia ketiga yang masih mengandalkan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomiannya. Teori Marxis berpendapat bahwa negara adalah instrumen kekuasaan kelas. Negara digunakan oleh kelas penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya dan untuk menindas kelas pekerja.

1.7.2 Ketergantungan

Ketergantungan dalam Marxisme mengacu pada situasi di mana negara berkembang secara ekonomi dan politik berada di bawah negara-negara maju. Subordinasi ini disebabkan oleh perkembangan sejarah sistem kapitalis global yang menyebabkan distribusi kekuasaan dan sumber daya yang tidak merata antara negara maju dan negara Dunia Ketiga. Hal ini membuat negara berkembang bergantung pada negara maju untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mereka (Shrum, 2001). Hubungan Ketergantungan ini bersifat asimetris dimana negara maju memiliki

kekuatan dan sumber daya yang lebih besar daripada negara berkembang. Ketidakseimbangan kekuatan ini mengarah pada eksploitasi negara-negara berkembang, karena mereka terpaksa bergantung pada negara-negara maju untuk modal, teknologi, dan keahlian. Ketergantungan dipandang sebagai posisi permanen daripada fase sementara, di mana negara berkembang tidak dapat melepaskan diri dari struktur kapitalis dan lepas dari eksploitasi (Thompson, 2023).

1.7.3 Eksploitasi

Dalam teori ketergantungan Marxisme, eksploitasi mengacu pada proses di mana negara-negara maju mengekstraksi nilai lebih dari negara-negara Dunia Ketiga. Negara-negara maju telah mengumpulkan kekayaan mereka dengan mengeksploitasi negara-negara miskin. Eksploitasi ini terjadi melalui hubungan pertukaran yang timpang antara negara maju dan negara berkembang, dimana negara maju diuntungkan dari pasokan bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pasar barang manufaktur mahal dari negara berkembang (Shrum, 2001). Eksploitasi ini merupakan salah satu bentuk imperialisme, yaitu suatu sistem di mana satu negara mendominasi negara lain, seringkali melalui sarana ekonomi dan politik.

1.8 Definisi Operasional

1.8.1 Kelas Sosial

Penulis menggunakan istilah kelas sosial untuk menjelaskan posisi negara Indonesia dan Belanda dalam perdagangan limbah. Untuk mengklasifikasikan negara-negara berdasarkan tingkat perkembangannya terdapat setidaknya 2 metode.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) sebagai metrik untuk menentukan apakah suatu negara sudah maju atau masih berkembang. HDI mencakup berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, harapan hidup, kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup. Negara dikatakan berkembang apabila memiliki skor HDI dibawah 0.8. Selain HDI, metode lain yang sering digunakan adalah dengan memeriksa pendapatan nasional bruto (GNI) nominal per kapita suatu negara. GNI nominal yang melampaui ambang batas \$12,696 akan menggolongkan negara sebagai negara maju, sedangkan GNI nominal di bawah ambang batas tersebut menandakan negara masih berkembang. GNI nominal per kapita memberikan gambaran umum tentang standar hidup suatu negara. Menurut data dari *World Population Review* tahun 2023, skor HDI negara Indonesia berada di angka 0.705 dan Belanda berada di angka 0.941. Sedangkan GNI Perkapita Indonesia sebesar \$3.870 dan Belanda sebesar \$57,871. Data ini menunjukkan bahwa negara Indonesia masih tergolong negara berkembang dan Belanda merupakan negara maju (World Population Review, 2023).

1.8.2 Ketergantungan

Ketergantungan dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan perdagangan limbah dalam fenomena impor limbah yang dilakukan oleh Indonesia dari negara Belanda. Penggunaan istilah ketergantungan memberikan gambaran yang lebih jelas untuk melihat keterkaitan antara fenomena impor limbah dengan situasi empirik yang terjadi seperti adanya penggolongan negara yang dalam menerima beban lingkungan. Dalam penelitian ini ketergantungan juga berfokus dalam konteks

ketergantungan Indonesia dalam impor limbah sebagai bahan baku industri daur ulang dari negara Belanda.

1.8.3 Eksploitasi

Penulis menggunakan istilah eksploitasi untuk menganalisis ketimpangan dalam akumulasi keuntungan dan beban yang harus ditanggung dari berbagai pihak dalam perdagangan limbah yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa yang ada. Dalam hal ini penulis mencoba mendeskripsikan fenomena yang terjadi dari studi kasus impor limbah yang dilakukan oleh Indonesia.

1.9.2 Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dari 2 sumber, yakni data primer yang berasal langsung dari sumber asli, serta data sekunder yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban penjelasan. Jawaban wawancara ini nantinya bisa memperkuat dan menambah referensi data primer dari penelitian ini. Melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, maka penelitian ini bisa mendapatkan data yang lebih konkrit. Sementara data sekunder dapat diperoleh melalui artikel jurnal, buku, dan dokumen-dokumen kredibel lainnya.

1.9.3 Teknik analisis data

Dalam melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan metode kongruen, di mana peneliti menggunakan studi kasus untuk memberikan bukti empiris sebagai bentuk penjelasan relevansi dari satu pendekatan teoretis. Tujuan prinsip studi small-N yang menerapkan analisis kongruensi adalah untuk memberikan kontribusi pada wacana ilmiah tentang relevansi dan kepentingan relatif dari teori-teori tertentu atau paradigma umum (Blatter, 2012). Pada prinsipnya, kontribusi semacam itu dapat mengambil empat bentuk:

- 1) Menyempurnakan teori-teori tertentu dalam program penelitian paradigmatis;
- 2) Mengembangkan sintesis teoretis baru di dalam atau lintas paradigma;
- 3) Memperkuat posisi teori atau paradigma dibandingkan dengan teori atau paradigma lain dalam wacana teoritis; dan
- 4) Memperkuat aspirasi teori atau paradigma baru untuk diakui dalam bidang penelitian.

1.10 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah yang diajukan oleh penulis serta teori atau konsep yang akan digunakan dalam menganalisis penelitian penulis.

BAB II IMPOR LIMBAH INDONESIA DARI BELANDA : Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari penelitian yang akan dilakukan, yang menyangkut

permasalahan limbah secara global serta penjabaran fenomena impor limbah yang terus dilakukan oleh Indonesia.

BAB III ANALISIS KETIMPANGAN DAN KETERGANTUNGAN DALAM IMPOR LIMBAH INDONESIA DARI BELANDA : Bab ini akan menjelaskan, menganalisis, serta memaparkan konsep dari teori ketergantungan untuk menganalisa fenomena impor limbah yang terus dilakukan oleh Indonesia.

BAB IV PENUTUP : Berisi kesimpulan yang mana menyimpulkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Dalam kesimpulan juga diikuti oleh ramifikasi penelitian yakni keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya